

ANALISIS TINGKAT PENDAPATAN DAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA NELAYAN DI BOROBUDUR KELURAHAN PADARNI

Febby S. Matulessy^{1*}

¹ Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota – Institut Sains dan Teknologi Indonesia Manokwari

Received: 20 Desember 2019 - Accepted: 12 Januari 2020

ABSTRACT

This research was aimed to find out and to analyse the level of income and poverty of fisherman household in Borobudur Padarni Village Manokwari Regency. The analysis technique used was descriptive quantitative analysis by using calculation analysis of fisherman's income and qualitative method by using phenomenological study that prioritize appreciation. This was done to describe the level of fisherman's poverty through several poverty indicators. The research results and data analysis showed that the average income of fishing gear fishermen in Borobudur is distributed in three groups, namely low income intervals starting from IDR.98,000,000.00 to IDR.220,999,999.90 with the number of respondents 71 or equal to 78.89%, then the intervals are starting from IDR. 221,000,000.00 to Rp.416,999,999.90 totalling 11 respondents or equal to 12.22%, and high intervals starting from IDR.417,000,000.00 s.d. IDR.710,999,999.90 as many as 8 respondents or 8.89%. The average household income of fishermen in a year is IDR.151,143,057.56 /month it is estimated that each fisherman household income of IDR.12,595,254.80. The community poverty analysis showed that based on area characteristics, it appears that building condition, level of incompatibility of building technical requirements, environmental road, PAM water access and the availability of wastewater access are below minimum standard. The human resources of traditional fishermen in Borobudur is low as the majority of fishermen have a elementary school level of education that cause the low level of productivity causing the low level of income. 60 fishermen or 66,67% in Borobudur do not have their own capital and have difficulties in accessing the capital institutions such as government and other financial institutions.

Keywords: Fishermen, income, poverty

PENDAHULUAN

Sudah sejak lama bangsa Indonesia telah memanfaatkan potensi kekayaan wilayah pesisir dan kekayaan lautnya sebagai sumber makanan. Fakta fisik Indonesia memiliki 17.500 pulau besar dan kecil (Adisasmita 2009 hal 1), dengan garis pantai sepanjang 81.000 Km, kondisi ini

menjadikan Indonesia sebagai sebuah Negara kepulauan terbesar di dunia dan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, luas daratan Indonesia sendiri mencapai 1.937 juta km², sementara luas lautan mencapai 5,8 juta km² (Dahuri dkk, 2001 hal 1). Dengan kondisi wilayah seperti demikian memungkinkan sebagian

* Korespondensi:

Email : febbysonya@gmail.com

Alamat : Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Sains dan Teknologi Indonesia Manokwari
Jl. Pasir Putih, Bakaro, No. 28 Manokwari Timur, Papua Barat

penduduk Indonesia mendiami daerah pesisir pantai.

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia sektor Kelautan dan Perikanan merupakan sektor yang diandalkan sebagai sektor unggulan dalam perekonomian, dikatakan demikian karena sebagian penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan, dan ada banyak tenaga kerja yang terserap pada sektor perikanan, Bisnis Indonesian line 2 Agustus 2016 mencatat sekitar 12 juta tenaga kerja yang bekerja di bidang perikanan dan kelautan. Sayangnya dengan kondisi kekayaan laut yang melimpah, namun kenyataannya, kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan sering diidentikkan dengan kemiskinan. (Nasution dan Badaruddin 2005:130)

Nelayan adalah mereka yang aktif menjalani pekerjaan melaut dalam bentuk penangkapan ikan dan hewan laut lainnya, dan merupakan kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas usaha dengan mendapatkan penghasilan dari usaha nelayan tersebut. Besarnya pendapatan nelayan sangat dipengaruhi oleh besar tangkapannya. Selain itu besar tangkapan bergantung pada musim nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan. kurangnya akses informasi, teknologi dan permodalan, menyebabkan posisi tawar nelayan semakin lemah. Kebijakan pemerintah juga seringkali kurang berpihak pada pemangku kepentingan di wilayah pesisir itu. Seharusnya pemerintah mulai mengevaluasi masalah ini dengan lebih serius.

Kondisi armada dan kelengkapan alat tangkap yang sebagian masih tradisional serta kemampuan pengetahuan yang sangat rendah ditambah dengan pola hidup yang konsumtif merupakan penyebab utama tingkat kesejahteraan nelayan semakin rendah lingkaran setan yang terus menjadikan nelayan semakin miskin.

Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2018) di Indonesia Tingkat kemiskinan perdesaan selalu lebih tinggi dibanding perkotaan. Pada September 2017, jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 26,58 juta jiwa atau sekitar 13,47% dari penduduk yang tinggal di pedesaan. Sementara jumlah penduduk miskin perkotaan berjumlah 10,27 juta jiwa atau sekitar 7,26% dari penduduk perkotaan. Alhasil, persentase kemiskinan penduduk perkotaan turun 47 bps menjadi 7,26 persen. Namun demikian terdapat tren penurunan angka kemiskinan dari waktu ke waktu

Menurut Rowntree (1901) dalam Sugiyarto *dkk* (2015), bahwa suatu keluarga termasuk dalam kemiskinan primer jika keseluruhan pendapatannya tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan minimumnya, kebutuhan fisik yaitu untuk konsumsi pangan. Kemiskinan selain dideskripsikan dari kegagalan pemenuhan standar kebutuhan pangan, juga lebih umum didasarkan atas perbandingan pada standar garis kemiskinan, yakni dikatakan miskin jika pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan. Lebihlanjut, kemiskinan dipandang dari pendekatan kesenjangan merupakan ketidak merataan yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat, utamanya pada kelompok termiskin dengan masyarakat lainnya. Garis kemiskinan bagi seorang individu dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang diperlukan seorang individu untuk mencapai level kesejahteraan minimum sehingga tidak disebut miskin. (Sen, 1981 dalam Sugiyarto *dkk*, 2015)

Mulayadi (2005:128-129) mengungkapkan bahwa permasalahan yang paling sering dijumpai dalam kaitannya dengan upaya peningkatan pendapatan nelayan adalah desa pantai pada umumnya terisolasi, ketrampilan yang dimiliki umumnya terbatas, teknologi yang dimiliki umumnya tidak mendukung penangkapan ikan dalam jumlah besar, peralatan yang dimiliki pada umumnya terbatas pada perahu dayung dan jala saja sehingga hasil tangkapanpun sedikit, permasalahan modal karena langkanya lembaga keuangan, kurang pemahaman tentang pengelolaan ikan dan siklus hidup biota laut, sehingga pencarian dan penangkapan ikan hanya berdasarkan pengalaman dan insting saja.

Salah satu wilayah di Kabupaten Manokwari yang banyak didiami nelayan adalah wilayah Borobudur Kelurahan Padarni. Nelayan di Borobudur merupakan nelayan tradisional dengan tingkat pengetahuan yang terbatas serta ketrampilan juga terbatas sehingga hanya menggunakan insting dalam melaut, tidak tahu dengan pasti dimana kantong-kantong ikan, selain itu rata-rata nelayan hanya memiliki perahu dengan kapasitas kecil yaitu motor tempel 40 PK, 15 PK, dan perahu dayung, artinya dengan perahu yang demikian kemampuan daya jelajah perahu tersebut tidak terlalu jauh dan daya tampung tangkapan juga sedikit hal ini akan berdampak pada besar pendapatan yang akan diterima nelayan Berdasarkan data statistik tahun 2017 terdapat 123 unit usaha perikanan di kelurahan Padarni dan sekitar $\pm 60\%$ nelayan berdomisili di lokasi Borobudur RT 001 dan RT 002.

Pendapatan dan pengeluaran memiliki hubungan yang positif dan linear, artinya bahwa jika terjadi perubahan pada pendapatan maka konsumsi juga akan mengikuti perubahan pendapatan tersebut, secara fungsional dapat diidentifikasi

bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah merupakan fungsi dari pendapatan rumah tangga, jumlah anggota keluarga, lingkungan sosial, cita rasa, musim, bahkan kebijakan pemerintah (Salakory, 2013). Perbedaan intensitas melaut, dan kapasitas produksi hasil tangkapan dari para nelayan, serta usaha-usaha lain selain sebagai nelayan tentunya juga akan sangat mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan, hal ini juga tentunya berlaku di kawasan Borobudur Kelurahan Padarni. Dengan demikian tulisan ini diarahkan untuk mengukur dan menganalisis persoalan pendapatan dan kemiskinan rumah tangga nelayan di Borobudur Kelurahan Padarni dengan judul penelitian: “Analisis Tingkat Pendapatan dan Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Di Borobudur Kelurahan Padarni”.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pendapatan rumah tangga dan karakteristik kemiskinan rumah tangga nelayan di Borobudur Kelurahan Padarni.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di RT 001 dan RT 002/RW04 Daerah Borobudur Kelurahan Padarni Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, pada bulan Februari 2019

Jenis dan sumber Data

Data yang dibutuhkan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa informasi tentang nelayan, kegiatan melaut, musim, dan kegiatan ekonomi rumah tangga nelayan, sementara data kuantitatif yang dibutuhkan berupa besaran biaya produksi, penjualan, harga ikan, lama melaut, pendapatan rumah tangga selain usaha perikanan. Data kualitatif diperoleh

dengan mengumpulkan langsung dari lokasi penelitian, yaitu melalui wawancara dan hasil-hasil yang diperoleh dari pengisian kuesioner. Selain itu data diperoleh lewat dokumentasi dan buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, meliputi harga input, harga output, dan total produksi.

Metode Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* terhadap 90 rumah tangga nelayan.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dipakai dalam kaitannya dengan analisis pendapatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perhitungan pendapatan usaha. Secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

Analisis tingkat Pendapatan

Analisis data yang digunakan dalam mencari pemecahan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah perhitungan pendapatan menurut Soekartawi, (2001: 56) adalah:

$$JI = TR - TC$$

Keterangan:

$R = P \times Q$

$TC = TFC + TVC$

$JI = \text{Pendapatan Nelayan}$

$TR = \text{Total revenue (total penerimaan)}$

$TC = \text{Total cost (Total biaya)}$

Metode kualitatif

Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang

mengutamakan penghayatan (*verstehen*), hal ini dilakukan untuk mendiskripsikan tingkat kemiskinan dari nelayan lewat beberapa indikator kemiskinan. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, dimana data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka (Sugiyono, 2008). Oleh karena itu maka sesuai dengan masalah yang dibahas maka proses yang dilalui adalah sesuai dengan masalah yang kedua maka untuk mengidentifikasi masalah kemiskinan di Borobudur hal-hal yang harus dilalui menurut Natalia dan Ali (2014) adalah Identifikasi karakteristik Kawasan, identifikasi karakteristik masyarakat dan analisis faktor kemiskinan. Selain itu indikator kemiskinan menurut program KOTAKU tahun 2019 juga digunakan sebagai alat ukur tingkat kemiskinan dengan kriteria penilaian jika kondisi batas ambang berada pada <19% dinyatakan tidak kumuh, jika berada pada ambang 19% s.d. 44% maka dinyatakan kumuh ringan, jika berada pada ambang 45% s.d. 70% dinyatakan kumuh sedang, dan jika berada pada ambang 71% s.d. 95% maka dinyatakan kumuh berat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku Biaya Nelayan Di Borobudur

Ongkos produksi dalam usaha nelayan terbagi menjadi dua kategori, yaitu ongkos dalam bentuk pengeluaran nyata (*actual cost*) dan ongkos yang tidak nyata (*inputet cost*). Dalam hal ini pengeluaran-pengeluaran nyata ada yang kontan dan ada yang tidak kontan. Pengeluaran-pengeluaran yang kontan yang ditemui pada nelayan responden adalah (1) bahan bakar dan oli; (2) pengeluaran untuk makanan/konsumsi awak; (3) pengeluaran untuk reparasi;

(4) dan pengeluaran untuk retribusi dan pajak.

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak kontan adalah upah/gaji awak nelayan pekerja yang pada umumnya bersifat bagi hasil dan dibayar setelah hasil produksi dijual. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak

nyata adalah penyusutan dari boat atau bodi perahu, mesin dan alat penangkapan karena biaya-biaya ini hanya merupakan pendugaan dan bukan pasti. Berikut data perilaku biaya nelayan responden:

Tabel 1. Biaya Total Nelayan Alat Tangkap Kail dan Jaring (dalam ribuan)

| No | Interval Biaya Total | | | Kategori | Frek. | % |
|--------|----------------------|-----|------------------|----------|-------|-------|
| 1 | 4.300.000,00 | s.d | 573.299.999,90 | Rendah | 76 | 84,44 |
| 2 | 573.300.000,00 | s.d | 1.142.299.999,90 | Sedang | 12 | 13,33 |
| 3 | 1.142.300.000,00 | s.d | 1.995.799.999,90 | Tinggi | 2 | 2,22 |
| Jumlah | | | | | 90 | 100 |

Sumber: Hasil Penelitian, diolah kembali, 2019

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sesuai interval biaya total yang dikeluarkan dalam memproduksi maka nelayan dengan pengeluaran rendah adalah sebanyak 76 orang nelayan atau sebesar 84,44%, 12 orang nelayan dengan pengeluaran sedang atau sebesar 13,33%, dan cuma 2 orang nelayan atau 2,22% kategori tinggi.

Selanjutnya penggunaan biaya terbesar dan sedang ada pada kelompok nelayan alat tangkap jaring dengan armada lebih dari 1 yang tentunya memiliki biaya produksi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain yang punya alat tangkap pancing serta armada cuma 1. Perbedaan biaya antara kedua kelompok nelayan dikarenakan biaya operasional yang juga tinggi pada kelompok nelayan dengan alat tangkap jaring disebabkan nelayan tersebut memiliki 2 buah armada tangkap dengan rata-rata mempekerjakan 14 tenaga kerja atau ABK. Fenomena lain yang didapat dari penelitian ini adalah yang menjadi penyebab tingginya biaya operasional adalah harga bahan bakar yang terlampaui tinggi di tingkat pengecer sementara nelayan tidak boleh membeli bahan bakar di SPBU, akibatnya

harus membeli dengan harga Rp.7.000,-/liter untuk minyak tanah dan Rp.8.500,-/liter untuk bensin, sementara kebijakan subsidi bahan bakar dan menurunkan harga bahan bakar oleh pemerintah bertujuan untuk menekan biaya produksi yang terlalu tinggi di kalangan pelaku ekonomi golongan bawah seperti nelayan, hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk mengawasi mata rantai penyaluran bahan bakar agar sampai ke tangan nelayan tetap dengan harga yang wajar.

Analisis Tingkat Penjualan Produksi Nelayan

Dalam perkembangan terakhir pada usaha nelayan adalah adanya harga pasar yang naik turun. Pada saat musim ikan atau tangkapan yang melimpah, harga ikan akan menurun hampir 200% dibandingkan dengan pada musim hujan dimana tangkapan sedikit. Biasanya keadaan ini terjadi pada musim panas, sedangkan pada musim hujan harga ikan tinggi. Pada musim hujan hasil tangkapan nelayan dengan alat tangkap

pancing mencapai 10 s.d. 20 ekor ikan kuning atau cakalang satu kali trip perjalanan dengan rerata harga yang diterima oleh nelayan pada musim hujan sebesar Rp. 50.000,- per ekor lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual langsung pada musim panas yang hanya sebesar Rp 20.000 per ekor, pada musim panas walaupun harga ikan murah tetapi produksinya bisa mencapai 40 s.d. 50 ekor per trip perjalanan, sementara bagi nelayan dengan alat tangkap jaring pada musim panas hasil tangkapannya mencapai 3 s.d. 4 keranjang ikan momar atau anak cakalang dengan harga per keranjang adalah sebesar Rp 1.000.000,- sedangkan pada musim hujan hasil tangkapannya mencapai 1 s.d. 2 keranjang dengan harga produksi hanya sebesar Rp2.000.000,- per keranjang. Perbedaan harga ini dianggap wajar dikala

diperhadapkan dengan mekanisme pasar dimana terjadi kekuatan tarik menarik antara penawaran dan permintaan ikan serta kelangkaan yang terjadi. Dimana pada saat musim panas, produksi meningkat sementara permintaan relatif tetap ini menyebabkan kelebihan produksi, agar produksi ikan bisa laku dan terjual abis dipasar maka harga ikan harus diturunkan. Sebaliknya pada musim hujan produksi ikan mengalami penurunan karena pengaruh musim sementara permintaan tetap tidak berubah, karena permintaan ikan tetap sementara produksi menurun atau permintaan besar sementara produksi rendah maka harga ikan naik. Berikut hasil penjualan ikan nelayan alat tangkap pancing dan jaring di Borobudur.

Tabel 2. Distribusi Frekwensi Responden Berdasarkan Interval Penerimaan Usaha (dalam ribuan)

| No | Interval Penerimaan Total | | | Kategori | Frek. | % |
|--------|---------------------------|------|------------------|----------|-------|-------|
| 1 | 6.000.000,00 | s.d. | 765.999.999,90 | Rendah | 75 | 83,33 |
| 2 | 766.000.000,00 | s.d. | 1.525.999.999,90 | Sedang | 13 | 14,44 |
| 3 | 1.526.000.000,00 | s.d. | 2.666.000.000,00 | Tinggi | 2 | 2,22 |
| Jumlah | | | | | 90 | 100 |

Sumber: Hasil Penelitian, diolah kembali, 2019

Penerimaan adalah besarnya hasil penerimaan yang diterima oleh produsen dari hasil penjualan sejumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit yang terjadi karena ada permintaan. Penerimaan usaha terdiri atas dua bagian yaitu penerimaan yang diperoleh dari usaha nelayan dan penerimaan yang didapat dari luar usaha nelayan.

Berdasarkan hasil perhitungan seperti yang terdapat pada tabel 2 terlihat bahwa penerimaan tertinggi atas penjualan hasil produksi nelayan berada pada interval Rp.1,526,000,000.00 s.d. Rp.2,666,000,000.00, pada interval ini

terdapat 2 responden atau sebesar 2,22% dari total responden.

Penerimaan usaha pada kategori sedang berada pada interval Rp.766,000,000.00 s.d. Rp.1,525,999,999.90 pada interval ini terdapat 13 responden atau sebesar 14,44% dari total responden, selanjutnya presentase terbesar nelayan yakni sebanyak 75 responden atau sebesar 83,3% berada pada kategori penerimaan usaha rendah dengan interval Rp.6,000,000.00 s.d. Rp.765,999,999.90.

Perbedaan penerimaan usaha nelayan sangat tergantung dari beberapa

variabel penentu, yakni jumlah hasil tangkapan, jenis alat tangkap, jenis armada, banyaknya armada yang dimiliki, frekwensi melaut dan musim, nelayan dengan alat tangkap jaring tentunya memiliki penerimaan usaha yang lebih tinggi dibandingkan nelayan dengan alat tangkap pancing, karena kapasitas dan kemampuan menangkap yang berbeda, nelayan dengan frekwensi melaut lebih banyak tentunya akan memiliki penerimaan usaha yang jauh lebih tinggi dibandingkan nelayan dengan frekwensi melaut yang lebih sedikit, demikian pula dengan nelayan yang memiliki armada tangkap lebih besar dan banyak akan memiliki penerimaan usaha lebih tinggi dibandingkan dengan nelayan yang memiliki armada lebih sedikit.

Analisis Tingkat Pendapatan Nelayan Dan Rumah Tangga Nelayan

Pendapatan Usaha Nelayan

Penerimaan nelayan terdiri atas dua bagian yaitu penerimaan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai nelayan dan penerimaan yang didapat dari luar usaha nelayan. Penerimaan tunai usaha didefinisikan sebagai nilai uang yang diterima dari penjualan produk usah. Penerimaan tunai tidak mencakup pinjaman uang untuk keperluan usaha. Pengeluaran tunai usaha tidak mencakup bunga pinjaman dan jumlah pinjaman pokok.

Tabel 3. Distribusi Frekwensi Responden Berdasarkan Pendapatan Usaha

| No | Interval Pendapatan Usaha | | | | Kategori | Frek. | % | |
|--------|---------------------------|----------------|------|----|----------------|--------|----|-------|
| 1 | Rp | 6.000.000,00 | s.d. | Rp | 193.999.999,90 | Rendah | 74 | 82,22 |
| 2 | Rp | 194.000.000,00 | s.d. | Rp | 475.999.999,90 | Sedang | 14 | 15,56 |
| 3 | Rp | 476.000.000,00 | s.d. | Rp | 663.999.999,90 | Tinggi | 2 | 2,22 |
| Jumlah | | | | | | | 90 | 100 |

Sumber: Hasil Penelitian, diolah kembali, 2019

Tabel 3 menunjukkan hasil perhitungan pendapatan nelayan yang merupakan selisih antara Penjualan Total (*total revenue*) dengan Biaya Total (*total cost*).

Berdasarkan hasil perhitungan seperti yang tertera pada Tabel 3, terlihat pendapatan nelayan terendah berada pada interval Rp.6.000.000, - s.d. Rp.193.999.999,90, dengan jumlah nelayan yang terdapat pada interval ini sebanyak 74 responden atau sebesar 82,22%, pada interval ke dua yakni kategori sedang intervalnya adalah sebesar Rp. 194.000.000,00 s.d. Rp.475.999.999,90 pada kategori ini terdapat 15,56% responden atau 14 orang, selanjutnya pada golongan

pendapatan tinggi dengan interval Rp.476.000.000. - s.d. Rp.663.999.999,90 terdapat 2 responden atau sekitar 2,22% saja. Rerata pendapatan nelayan adalah sebesar Rp.77,683,042.84 per tahun atau Rp.6,473,586.90 perbulannya. Tingginya pendapatan pada nelayan disebabkan yang bersangkutan memiliki armada lebih serta mampu menekan biaya produksi.

Pendapatan Usaha Lain

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka hampir sebagian besar nelayan harus mencari cara lain untuk menambah pendapatan keluarganya. Cara yang digunakan adalah dengan berdagang

seperti membuka kios, berjualan ikan dipasar, berjualan sayur, es batu, dan pulsa. Berikut data pendapatan usaha lain.

Tabel 4. Distribusi Frekwensi Responden Berdasarkan Pendapatan Usaha Lainnya

| No | Interval Pendapatan Usaha Lainnya | | | | Kategori | Frek. | % |
|--------|-----------------------------------|---------------|------|-------------------|----------|-------|-------|
| 1 | Rp | - | s.d. | Rp 30.999.999,90 | Rendah | 35 | 38,89 |
| 2 | Rp | 31.000.000,00 | s.d. | Rp 61.999.999,90 | Sedang | 37 | 41,11 |
| 3 | Rp | 62.500.000,00 | s.d. | Rp 108.499.999,90 | Tinggi | 18 | 20,00 |
| Jumlah | | | | | | 90 | 100 |

Sumber: Hasil Penelitian, diolah kembali, 20198

Berdasarkan tabel 4 Interval pendapatan usaha lain nelayan berada pada interval kurang dari 30.999.999,90, interval Rp.31,000,000.00 s.d. Rp.61,999,999.90 dan interfal Rp.62,500,000.00 s.d. Rp.108,499,999.90, pada kategori pendapatan usaha lain redah terdapat 35 orang responden atau sebesar 38,89% dari total responden, rendahnya pendapatan usaha lainnya disebabkan ada nelayan yang tidak memiki usaha lainnya, selain itu sebagian dari mereka berjualan ikan asap dan sayur dipasar, mereka juga memiliki usaha yang tidak besar dibandingkan dengan dua kelompk lainnya, pada kategori sedang ada 37 orang atau sekitar 41,11% dari total responden berada pada kategori ini, skala pendapatanya dipengaruhi oleh skala usaha yang dirintisnya, rata-rata dari mereka

berjualan ikan asap, menjual es batu atau membuka kios kecil dirumahnya, sementara nelayan dengan pendapatan usaha lain yang berada pada kategori tinggi berjumlah 18 orang atau sekitar 20% dari total resonden, pada kategori ini rata-rata nelayan memiliki usaha es batu dan kios yang besar bahkan ada dari mereka yang memilki toko sembako dan memberikan pinjaman bagi sesama nelayan. sebagian besar nelayan memiliki pendapatan usaha rendah yakni sebanyak 74.

Dengan diketahuinya pendapatan usaha dan pendapatan usaha lainnya dari setiap rumah tangga nelayan maka dapat diketahui pendapatn rumah tangga nelayan sebagaimana yang terlihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Distribusi Frekwensi Responden Berdasarkan Pendapatan Rumah Tangga

| No | Interval Pendapatan Rumah Tangga | | | | Kategori | Frek. | % |
|--------|----------------------------------|----------------|------|-------------------|----------|-------|-------|
| 1 | Rp | 98.000.000,00 | s.d. | Rp 220.999.999,90 | Rendah | 71 | 78,89 |
| 2 | Rp | 221.000.000,00 | s.d. | Rp 416.999.999,90 | Sedang | 11 | 12,22 |
| 3 | Rp | 417.000.000,00 | s.d. | Rp 710.999.999,90 | Tinggi | 8 | 8,89 |
| Jumlah | | | | | | 90 | 100 |

Sumber: Hasil Penelitian, diolah kembali, 2019

Berdasarkan tabel 5, pendapatan rumah tangga nelayan terdistribusi dalam

tiga kelompok yakni interval pendapatan rendah mulai dari Rp.98,000,000.00 s.d.

Rp.220,999,999.90 dengan jumlah responden 71 atau setara 78,89%, selanjutnya interval sedang mulai dari Rp. 221,000,000.00 s.d. Rp.416,999,999.90 sebanyak 11 responden atau sebesar 12,22%, dan interval tinggi mulai dari Rp.417,000,000.00 s.d. Rp.710,999,999.90 sebanyak 8 responden atau sebesar 8,89%. Rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan dalam setahun adalah sebesar Rp.151,143,057.56 dan perbulannya

diperkirakan tiap rumah tangga nelayan memperoleh pendapatan sebesar Rp.12,595,254.80

Analisis pendapatan rumah tangga nelayan berhubungan dengan tingkat tingkat kesejahteraannya, dan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga salah satu indikator penting adalah pendapatan perkapita, pendapatan perkapita rumah tangga nelayan terlihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Pendapatan Perkapita Rumah Tangga Nelayan Borobudur

| No | Interval Pendapatan Perkapita | | | | Kategori | Frek. | % |
|--------|-------------------------------|--------------|-----|------------------|----------|-------|--------|
| 1 | Rp | 450.000,00 | s.d | Rp 3.249.999,90 | Rendah | 71 | 78,889 |
| 2 | Rp | 3.250.000,00 | s.d | Rp 6.049.999,90 | Sedang | 11 | 12,222 |
| 3 | Rp | 6.050.000,00 | s.d | Rp 10.249.999,90 | Tinggi | 8 | 8,8889 |
| Jumlah | | | | | | 90 | 100 |

Berdasarkan tabel 6 pendapatan perkapita rumah tangga nelayan berada antara Rp. 450,000,- s.d. Rp.10,249,999,90, pendapatan perkapita dengan kategori rendah berada pada interval Rp.450,000,- s.d. Rp.3,249,999,90, pada interval ini terdapat 71 responden atau sebanyak 78,89% responden dari total responden, selanjutnya 11 responden atau sebanyak 12,22% responden berada pada interval sedang dengan pendapatan perkapita Rp.3,250,000.- s.d. Rp.6,049,999,90, sedangkan yang sisanya sebanyak 8 orang responden atau 8,89% adalah nelayan dengan pendapatan perkapita tinggi.

Secara keseluruhan rerata pendapatan perkapita rumah tangga nelayan responden adalah sebesar Rp.1,942,176.69 dengan rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 4,81 jiwa, yang bila dibandingkan dengan data yang dirilis oleh BPS Papua Barat per 17 Januari 2019 bahwa pendapatan perkapita Papua Barat dibawah garis kemiskinan adalah sebesar Rp.560,976,- maka pendapatan perkapita rumah tangga

nelayan di Borobudur jauh diatas garis kemiskinan tersebut.

Kondisi pendapatan perkapita sebesar itu belum tentu secara mutlak menggambarkan tingkat kesejahteraan nelayan karena ternyata masih ada beberapa rumah tangga yang pendapatan perkapitanya dibawah standart BPS, selain itu biaya-biaya yang timbul di luar proses usaha nelayan sangat besar, di lain sisi biaya hidup yang tinggi turut mempengaruhi tingkat pengeluaran nelayan. Oleh karena itu maka keberpihakan pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan perlu menjadi perhatian pemerintah.

Beberapa nelayan menghendaki adanya penyuluhan yang kontinyu oleh Dinas perikanan dan pendampingan guna peningkatan produksi taninya. Selain itu perlu ada lembaga pemasaran yang bisa membantu menyalurkan hasil nelayan karena dengan adanya lembaga pemasaran ini harga ikan dapat dijual dengan tingkat harga yang lebih tinggi, nelayan sering diperhadapkan dengan dua pilihan penting yakni menjual langsung ke pasar dengan

harga yang tinggi tetapi biaya juga tinggi atau menjual ke pedagang pengepul atau tengkulak tetapi dengan harga yang rendah, oleh karena itu keberadaan lembaga pemasaran tersebut menjadi sangat penting.

Selain itu karena berbagai macam faktor yang berpengaruh terhadap usaha nelayan maka tentunya tingkat pendapatan dan biaya totalnya akan sangat berbeda pada setiap responden. Faktor-faktor yang berpengaruh diantaranya besar jenis alat tangkap, jangkauan melaut, intensitas/frekwensi melaut, dan harga bahan bakar.

Analisis Kemiskinan Masyarakat Nelayan Borobudur

Untuk menganalisis kemiskinan Rumah Tangga Nelayan di Borobudur dipakai pendekatan dan kriteria yang menurut Natalia dan Alie (2014) adalah Identifikasi karakteristik Kawasan, Identifikasi karakteristik masyarakat dan Analisis faktor kemiskinan. Beberapa acuan para ahli seperti Kuncoro (2013), Kusnadi (2003) dan Sharp (1996) dan indikator kemiskinan menurut program KOTAKU tahun 2019 turut dijadikan referensi dalam analisis kemiskinan ini. Mengacu pada kriteria tersebut maka berikut kondisi kawasan borobudur berdasarkan hasil penelitian.

Identifikasi Karakteristik Kawasan

Kemiskinan selalu diidentikan dengan permukiman kumuh, Dewi (2011) mengatakan bahwa salah satu penyebab timbulnya kawasan kumuh adalah faktor ekonomi atau kemiskinan mendorong bagi pendatang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota-kota. Dengan keterbatasan pengetahuan, ketrampilan, dan modal, maupun adanya persaingan yang sangat ketat diantara sesama pendatang maka pendatang-pendatang tersebut hanya

dapat tinggal dan membangun rumah dengan kondisi yang sangat minim di kota-kota. Di sisi lain pertambahan jumlah pendatang yang sangat banyak mengakibatkan pemerintah tidak mampu menyediakan hunian yang layak.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 permukiman kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Khomarudin mengutip pendapat Danisworo (1997) dalam Patrisia (2017) bahwa tumbuhnya permukiman-permukiman spontan dan permukiman kumuh adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses urbanisasi. Akibat dari adanya urbanisasi, muncul berbagai masalah sosial seperti timbulnya permukiman kumuh, menurunnya pendapatan daerah, kurang terjaganya aspek lingkungan, pendidikan yang rendah, serta timbulnya konflik sosial antar masyarakat. Permukiman kumuh yang terjadi memberikan pengaruh negatif baik bagi penghuninya maupun lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil indentifikasi kawasan meliputi kondisi bangunan, lingkungan jalan, kondisi penyediaan air minum, dan kondisi ketersediaan drainase lingkungan, didapati kondisi bangunan gedung di RT 001/RW 05 dan RT 002/05 menunjukkan tingkat ketidak aturan sebesar 88% menunjukkan tingkat ketidak tinggi karena berada pada ambang batas 71%-95%, selanjutnya tingkat ketidak sesuaian persyaratan teknis bangunan mencapai 94% menunjukkan tingkat ketidak sesuaian tinggi karena berada pada ambang batas 71%-95%. Kualitas bangunan pada umumnya adalah semi permanen bagi yang di darat dan yang di air pada umumnya rumah berlabuh yang semuanya berlantai papan dan berdinding papan, hanya terdapat

3 rumah atau 3,26% dari total yang memenuhi syarat ALADIN (Atap Lantai dan Dinding) sementara 96,74% atau 89 rumah tidak memenuhi standar minimal ALADIN. Selain itu indikator kondisi jalan lingkungan yang layak di lokasi hanya sebesar 0,85% ini disebabkan sebagian besar jalan adalah jalan setapak dari semen yang sudah hancur dan jembatan kayu di sekitar pemukiman rumah berlabuh. Berdasarkan kriteria ketersediaan air minum, sebanyak 45 kepala keluarga atau 51% memiliki ketersediaan akses ke air PAM, sayangnya hanya 33 kepala keluarga atau sekitar 35,87% yang terpenuhi air PAM, sementara 64,13% kepala keluarga tidak terpenuhi kebutuhan air PAM

Kondisi pengelolaan air limbah menunjukan bahwa 84,42% kepala keluarga sistem pengelolaan tidak sesuai, selanjutnya prasarana dan sarana yang tidak sesuai dengan prasyarat teknis adalah sebanyak 85,53% kepala keluarga, hal ini menunjukan bahwa tingkat ketidak sesuaian berat karena berada pada ambang 71% s.d. 97%. Indikator selanjutnya adalah kondisi pengelolaan persampahan yang meliputi sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis dan tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan standar minimal, pengelolaan persampahan, hasil penelitian menunjukan bahwa semua warga walaupun demikian ada 3 kepala keluarga yang sampahnya terangkut ke pembuangan akhir (TPA) yang sisanya tidak terangkut ke TPA, artinya bahwa bila tidak terangkut ke TPA maka sampah tersebut dibuang di sekitar halaman, dibakar, ataupun dibuang ke laut.

Identifikasi Karakteristik Masyarakat

Wayan dan Napitupulu (2007) menyampaikan bahwa karakteristik penduduk miskin khususnya di pedesaan

dapat dilihat dari segi Kinerja pendidikan, Kesehatan, dan proporsi pengeluaran keluarga, sementara menurut Kornita dan Yusbar (2011) *dalam* Natalia dan Ali (2014) karakteristik masyarakat miskin ditinjau dari aspek ekonomi dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan mata pencaharian. Sedangkan, Zarmawis (2003) *dalam* Natalia dan Ali (2014) mengatakan bahwa karakteristik sosial masyarakat dilihat dari lama tinggal, umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, dan status kepemilikan rumah, oleh karena itu maka untuk mengetahui karakteristik masyarakat di lokasi penelitian hal berikut perlu diperhatikan:

- a) Pendapatan utama rumah tangga nelayan bersumber dari hasil melaut ditambah dengan usaha lainnya. Pendapatan rumah tangga nelayan di RT 001 dan RT 002 berfariatif, karena sangat tergantung pada jenis alat tangkap, jangkauan melaut, frekwensi melaut, harga bahan bakar, dan pekerjaan lainnya. Merujuk pada tabel 6 ada 71 responden atau sekitar 78,89% memilki pendapatan perkapita terendah yang bekisar pada Rp.450.000,- s.d. Rp.10.249.999.90, selanjutnya sebagian besar pengeluaran dihabiskan untuk makanan, membayar cicilan pinjaman pada rentenir ataupun pinjaman di atara sesama nelayan, kemudian menutupi hutang belanja di kios atau tukang kredit pakaian.
- b) Tingkat pendidikan nelayan di Brobudur Kelurahan Padarni Kabupaten Manokwari dapat dilihat pada Tabel 7.

Berdasarkan tabel 7 pendidikan nelayan terendah adalah SD dengan jumlah 46 orang atau 51,11%, selanjutnya diikuti SLTP dengan jumlah 37 orang atau 41,11%, dan tingkat pendidikan SLTA berada pada bagian teratas dengan distribusi responden sebesar 7 orang atau setara dengan 7,8%.

Tabel 7. Pendapatan Perkapita Rumah Tangga Nelayan Borobudur

| No | Pendidikan | Frekwesi (Org) | Persen |
|--------|------------|----------------|--------|
| 1 | SD | 46 | 51,11 |
| 2 | SMP | 37 | 41,11 |
| 3 | SMA | 7 | 7,78 |
| Jumlah | | 90 | 100 |

Analisi Faktor Kemiskinan

Perbedaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia nelayan tradisional di Borobudur pada umumnya masih sangat rendah. Hal ini dapat terlihat dari rendahnya tingkat pendidikan para nelayan tradisional, dimana nelayan dengan tingkat pendidikan terendah yakni SD dengan jumlah 46 orang atau 51,11%, selanjutnya diikuti SLTP dengan jumlah 37 orang atau 41,12%, dan tingkat pendidikan SLTA berada pada bagian teratas dengan distribusi responden sebesar 7 orang atau setara dengan 7,78%. Dengan sebagian besar nelayan yang hanya berpendidikan SD menyebabkan produktifitas rendah akibatnya Pendapatan sudah pasti rendah, sebagian besar nelayan melaut hanya dengan pengetahuan seadanya dengan bermodalkan GPS untuk menandai lokasi mereka, sementara mengenai kantong-kantong ikan hanya diketahui nelayan berdasarkan kebiasaan, akibatnya hasil tangkapanpun tidak maksimal, selain itu kemampuan

mengelola usaha dan keuangan usaha tidak maksimal yang berdampak pada ekonomi biaya tinggi pada usahanya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sudarsono (2008) yang mengatakan bahwa penduduk komunitas pantai yang hampir sebagian besar bekerja sebagai nelayan tradisional umumnya mempunyai ciri yang sama yaitu kurang berpendidikan. Untuk bekal bekerja mencari ikan di laut, latar belakang pendidikan seseorang memang tidak penting. Artinya, karena pekerjaan sebagai nelayan sedikit-banyak merupakan pekerjaan kasar yang lebih banyak mengandalkan otot dan pengalaman, maka setinggi apa pun tingkat pendidikan nelayan itu tidaklah akan mempengaruhi kecakapan mereka melaut.

Sementara Kusnadi dalam Sudarsono (2008) mengatakan persoalan dan arti penting tingkat pendidikan ini biasanya baru mengedepan jika seorang nelayan ingin berpindah pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Dengan pendidikan yang rendah, jelas kondisi itu akan mempersulit nelayan tradisional memilih atau memperoleh pekerjaan lain, selain menjadi nelayan. Keterkaitan pendidikan dengan kemiskinan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Oleh karena itu masalah pendidikan dan kemiskinan merupakan persoalan besar yang dihadapi negara-negara berkembang, apakah pertumbuhan ekonomi yang lebih dahulu dipacu ataukah pendidikan yang lebih baik. Persoalan ini sukar dijawab, sehingga ia lebih merupakan sebuah lingkaran setan (*vicious circle*)

Aspek Kepemilikan Modal

Modal entah berupa finansial maupun barang modal merupakan salah satu variabel

penentu jalannya suatu kegiatan usaha, begitupun nelayan di Borobudur modal usaha berbentuk uang tunai dan barang modal seperti body/perahu, mesin atau motor tepel, jaring dan alat tangkap lainnya. Dari aspek kepemilikan modal didapati sekitar 60 Nelayan atau 66,67% tidak memiliki modal sendiri tetapi bekerja pada pemilik modal atau nelayan juragan, 20 orang nelayan 22,22% responden memiliki modal sendiri dan separuhnya disubsidi pemerintah, semetara 10 orang nelayan atau sekitar 11,11% adalah pemilik modal murni bahkan memiliki armada lebih dari 1 (satu). Keterbatasan kepemilikan modal menyebabkan mereka tidak dapat melakukan peningkatan hasil produksi baik dari segi jumlah, kualitasnya, maupun intensitas melaut. Bila hasil produksi tidak dapat ditingkatkan sama artinya dengan produktivitasnya rendah dan hal ini berakibat pada rendahnya pendapatan yang diterima. Memperhatikan besarnya komposisi nelayan yang tidak memiliki modal baik secara finansial maupun barang modal maka pasti berdampak pada rendahnya pendapatan yang dimiliki, maka nelayan makin miskin dan tidak berdaya, akibatnya distribusi pendapatan dan kesenjangan antara nelayan pekerja (tidak memiliki modal) dengan nelayan juragan (pemilik modal) semakin lebar.

Perbedaan Akses Permodalan

Dengan kualitas pendidikan yang rendah membuat tingkat pemikiran dan inovasi nelayan juga rendah, kondisi riil menunjukan bahwa nelayan di Borobudur sangat sulit mengakses lembaga-lembaga permodalan yang sebenarnya memberikan kemudahan baik itu pemerintah maupun lembaga keuangan, kecenderungan nelayan adalah lebih banyak berhubungan dengan rentenir ataupun koperasi simpan pinjam, hal ini bagaikan lingkaran setan kemiskinan

yang terus terjadi di hampir sebagian besar nelayan di Borobudur. Beberapa nelayan merasa kurang percaya diri berhubungan dengan lembaga keuangan formal karena merasa tidak pantas ke lembaga keuangan tersebut, akibatnya mereka selalu tergantung pada rentenir sehingga mereka hanya berkutat pada masalah pelunasan hutang dengan bunga yang tinggi pada rentenir sehingga kesejahteraannya terabaikan. Secara kasak mata dan dalam jangka pendek pinjaman yang dilakukan memang membantu perekonomian keluarga, saat uang pinjaman diperoleh biasanya sebagian besar uang dibelajakan hanya untuk

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- 1) Pendapatan rumah tangga nelayan terdistribusi dalam tiga kelompok yakni interval pendapatan rendah mulai dari Rp.98,000,000.00 s.d. Rp.220,999,999.90 dengan jumlah responden 71 atau setara 78,89%, selanjutnya interval sedang mulai dari Rp. 221,000,000.00 s.d. Rp.416,999,999.90 sebanyak 11 responden atau sebesar 12,22%, dan interval tinggi mulai dari Rp.417,000,000.00 s.d. Rp.710,999,999.90 sebanyak 8 responden atau sebesar 8,89%. Rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan dalam setahun adalah sebesar Rp.151,143,057.56 dan perbulannya diperkirakan tiap rumah tangga nelayan memperoleh pendapatan sebesar Rp.12,595,254.80.
- 2) Identifikasi Karakteristik kawasan meliputi Kondisi Bangunan, dimana kondisi bangunan gedung di RT 001/RW 05 dan RT 002/05 menunjukan

tingkat ketidak aturan sebesar 88% menunjukkan tingkat ketidak aturan tinggi, selanjutnya tingkat ketidak sesuaian persyaratan teknis bangunan mencapai 94% artinya tingkat ketidak sesuaian tinggi. Kulaitas bangunan pada umumnya adalah semi permanen bagi yang di darat dan yang di air pada umumnya rumah berlabuh 96,74% tidak memenuhi standar minimal ALADIN (Atap Lantai dan Dinding). Jalan lingkungan yang layak di lokasi hanya sebesar 0,85%, sebagian besar jalan adalah setapak dari semen yang sudah hancur dan jembatan kayu di sekitar pemukiman rumah berlabuh. 51% memiliki ketersediaan akses ke air PAM, 35,87% yang terpenuhi air PAM. Kondisi pengelolaan air limbah menunjukkan bahwa 84,42% kepala keluarga sistem pengelolaan tidak sesuai, selanjutnya prasarana dan sarana yang tidak sesuai dengan prasyarat teknis adalah sebanyak 85,53% kepala keluarga, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketidak sesuaian berat karena berada pada ambang 71% s.d. 97%. Indikator selanjutnya adalah kondisi pengelolaan persampahan yang meliputi sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis dan tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan standar minimal, pengelolaan persampahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua warga walaupun demikian ada 3 kepala keluarga yang sampahnya terangkut ke pembuangan akhir (TPA) yang sisanya tidak terangkut ke TPA, artinya bahwa bila tidak terangkut ke TPA maka sampah tersebut dibuang di sekitar halaman, dibakar, ataupun dibuang ke laut.

3) Faktor penyebab kemiskinan menunjukkan Sumber daya manusia nelayan tradisonal di Borobudur pada umumnya masih sangat rendah, dengan sebagian besar nelayan yang hanya berpendidikan SD menyebabkan produktifitas rendah akibatnya Pendapatan sudah pasti rendah. 60 Nelayan atau 66,66% tidak memiliki modal sendiri tetapi bekerja pada pemilik modal atau nelayan juragan, Keterbatasan kepemilikan modal menyebabkan mereka tidak dapat melakukan peningkatan hasil produksi baik dari segi jumlah, kualitasnya, maupun intensitas melaut. Nelayan di Borobudur sulit mengakses lembaga-lembaga permodalan yang sebenarnya memberikan kemudahan baik itu pemerintah maupun lembaga keuangan, kecenderungan nelayan adalah lebih banyak berhubungan dengan rentenir ataupun koperasi simpan pinjam, hal ini bagaikan lingkaran setan kemiskinan yang terus terjadi di hampir sebagian besar nelayan di Borobudur. Beberapa nelayan merasa kurang percaya diri berhubungan dengan lembaga keuangan formal karena merasa tidak pantas ke lembaga keuangan tersebut.

Rekomendasi

Yang menjadi saran dan rekomendasi dari penelitian ini adalah:

- 1) Dinas Perikanan dan Kelautan harus melakukan penyuluhan yang kontinyu dan pendampingan guna memahami persoalan nelayan tentang kesulitan bahan bakar, kemampuan memprediksi musim, kemampuan memprediksi dimana tempat atau lumbung ikan terbaik dan bukan karena insting dan pengalaman tetapi harus berdasarkan pengetahuan yang jelas.

- 2) Perlu ada lembaga pemasaran yang bisa membantu menyalurkan hasil nelayan karena dengan adanya lembaga pemasaran ini harga ikan dapat dijual dengan tingkat harga yang lebih tinggi, nelayan sering diperhadapkan dengan dua pilihan penting yakni menjual langsung ke pasar dengan harga yang tinggi tetapi biaya juga tinggi atau menjual ke pedagang pengepul tetapi dengan harga yang rendah, oleh karena itu keberadaan lembaga pemasaran tersebut menjadi sangat penting.
- 3) Dalam kaitannya dengan upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan masyarakat pesisir maka perhatian terhadap jalan, selokan, akses air bersih, bahkan perumahan harus menjadi program prioritas pemerintah Kabupaten Manokwari dan Pemerintah Provinsi Papua Barat
- 4) Perlu adanya perhatian yang lebih serius pemerintah bagi nelayan khususnya untuk membantu nelayan dari sisi permodalan.

REFERENSI

- Adisasmita Rahadjo, 2009, *Pengembangan Ekonomi Kawasan/Wilayah Perbatasan*, dicetak oleh CV.Budi Daya, Diterbitkan Oleh Pusat Pengembangan Keuangan dan Keuangan Daerah (PPKED) Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanudin, Makasar.
- Diulio Eugene A., 1989, *Teori Makro Ekonomi*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Dahuri Rokhmin H., Rais jacub, Ginting Putra Sapta, Sitepu J. M., 2001, *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta Timur
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Friedmann, Jhon.(1992). *Empowerment: The Politics Alternative Development*. Chambridge,Blackwell.
- Hamdani Haris, Wulandari Kusuma, 2013, Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional, Artikel Ilmiah Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember(UNEJ), <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58737/Haris%20Hamdani.pdf;sequence=1>,
- Hanafie Rita, 2010, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Husen S. Ishak, 2015, *dinamika perubahan Sosial masyarakat Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Kelurahan Mafututu Kota Tidore Kepulauan*, <https://www.google.co.id/url?sa=t&rc=tj&q=&esrc=s&source=web&cd=27&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA4ujGhcvUAhULNY8KHYnkBn44FBAWCEowBg&url=https%3A%2F%2Fjournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2Fholistik%2Farticle%2Fdownload%2F6695%2F6215&usg=AFQjCNHUayP1hRYzrIz7oKXFh4RtWv2jzg>, diakses 20 Maret 2019.
- Jarmal Badrul, Multifiah, 2014, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan (Studi Kasus Nelayan Desa Klampis, Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan*, <https://www.google.co.id/url?sa=t&rc=tj&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXyNPDv9LUAhWKN48KHWvXDg4QFghEMAQ&url=htt>

- [p%3A%2F%2Fdownload.portalgaruda.org%2Farticle.php%3Farticle%3D189635%26val%3D6467%26title%3DAnalisis%2520Faktor-Faktor%2520Yang%2520Mempengaruhi%2520Pendapatan%2520Nelayan%2520\(Studi%2520Nelayan%2520Desa%2520Klampis%2C%2520Kec.%2520Klampis%2C%2520Kab.%2520Bangkalan\)&usg=AFQjCNEovGxJb6oFKXQxncvUI4ngNbfQYQ](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=3D189635%26val%3D6467%26title%3DAnalisis%2520Faktor-Faktor%2520Yang%2520Mempengaruhi%2520Pendapatan%2520Nelayan%2520(Studi%2520Nelayan%2520Desa%2520Klampis%2C%2520Kec.%2520Klampis%2C%2520Kab.%2520Bangkalan)&usg=AFQjCNEovGxJb6oFKXQxncvUI4ngNbfQYQ), diakses 23Maret2019
- Mulyadi S, 2005, *Ekonomi Kelautan*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Natalia Mita, Alie Muhammad Mukti, 2014, *Kajian Kemiskinan Pesisir Di Kota Semarang (Studi Kasus: Kampung Nelayan Tambak Lorok)*, Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 1 2014. hal. 50-59 Online: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk> diakses Desember 2018
- Natalia Mita, Alie Mukti Muhammad, 2014, *Kajian Kemiskinan Pesisir (Studi Kasus : Kampung Nelayan Tambak Lokal)*, Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 1 2014, hal. 50-59), <https://media.neliti.com/media/publications/214338-kajian-kemiskinan-pesisir-di-kota-semara.pdf>, diakses Desember 2018
- Nashir Moh, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia
- Nasution A, Badaruddin. 2005. *Isu-Isu Kelautan Dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 130
- Patrisia Eka Novliza, 2017, *Penataan Perumahan Kumuh Kota Berbasis Kawasan* jurnal professional fis unived vol. 4 no. 2 desember 2017
- Pratama Rahrdja, Manurung Mandala, 2008, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)* Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Primyastanto Mimit, Soemarno, Efani Anthon, Muhammad Sahri, 2012, *Kajian Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Payang di Selat Madura Jawa Timur*, Jurnal Wacana Vol.15, no. 2.(2012) hal. 12-19, ISSN: 1411-0199, E-ISSN : 2338-1884, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=272800&val=7123&title=Kajian%20Ekonomi%20Rumah%20Tangga%20Nelayan%20Payang%20Di%20Selat%20Madura,%20Jawa%20Timur>. Diakses 20 Maret 2019
- Rahardja P., Manurung M., 2006, *Teori Ekonomi Mikro suatu Pengantar*, LP FEUI, Jakarta.
- Salakory Marthin Sammy Hans, 2016, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Berdasarkan Nilai Tukar (NTN) Di Kampung Sowi- IV Kabupaten Manokwari*, The Journal of Fisheries Development, Januari 2016 Volume 2, nomor 2, Hal:45-54 <https://docplayer.info/63358168-Analisis-tingkat-kesejahteraan-rumah-tangga-nelayan-berdasarkan-nilai-tukar-ntn-di-kampung-sowi-iv-kabupaten-manokwari.html>, Akses Januari 2019
- Samuelson, P. A. & Nordhous, D. W., 1993, *Mikro Ekonomi*, edisi ke-empat belas, Erlangga, Jakarta.
- Sudarsono, 1995, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Penerbit PT.Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota IKAPI, Jakarta

- Sharp, Ansel M., Charles A. Register, and Paul W. Cerimes. 1996. *Economics of Social Issues* (edisi ke 12). Richard D., Chicago: Irwin
- Singarimbun Masri, Effendi Sofian, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, PT Pustaka LP3ES Indonesia
- SoekartawiSoehardjo A. Dillon L Jhon, Hardaker Brian J.,2011.*IlmuNelayan danPeneitianuntukPengembanganNelayanKecil*.UniversitasIndonesiaPres s,Jakarta.
- Soeharjo,A.danP.Dahlan.1973. *Sendi-Sendi Pokok Nelayan. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian*, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, 2011, *Kementrian Kelautan dan Perikanan*, Jakarta, 2011, [http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWqtHkmNDUAhVLt48KHbcyD8cQFghYMAg&url=http%3A%2F%2Fledhyane.lecture.ub.ac.id%2Ffiles%2F2015%2F02%2FDJPT_2011-Statistik-Perikanan-Tangkap-Indonesia 2010.pdf&usq=AFQjCNHEGWV7mxyZcKUSKRD7SCn4B6hlRA](http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWqtHkmNDUAhVLt48KHbcyD8cQFghYMAg&url=http%3A%2F%2Fledhyane.lecture.ub.ac.id%2Ffiles%2F2015%2F02%2FDJPT_2011-Statistik-Perikanan-Tangkap-Indonesia%2010.pdf&usq=AFQjCNHEGWV7mxyZcKUSKRD7SCn4B6hlRA) diakses 21 Maret 2019
- Sudarso. (2008). Tekanan Kemiskinan Struktural Komunitas Nelayan Tradisional di Perkotaan *Jurnal Ekonomi. FISIP. Universitas Airlangga*. surabaya.
- Sugiarto 2007, *Ekonomi Mikro, Sebuah Kajian Komperhensif*, Penerbit Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Sugiyarto, Jangkung Handoyo Mulyo, Rosalia Natalia Seleky, 2015, Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Di Kabupaten Bojonegoro, *jurnal Agro Ekonomi* Vol. 26/No. 2, Desember 2015,Hal.115-120
- Sugiyarto, Jangkung Handoyo Mulyo, Rosalia Natalia Seleky, 2015, Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Di Kabupaten Bojonegoro, *jurnal Agro Ekonomi* Vol. 26/No. 2, Desember 2015,Hal.115-120
- Sugiharto Sujano, 2008, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di kabupaten langkat*, Thesis Universitas Sumatera Utara, Medan<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/7165/09E00282.pdf;jsessionid=27026B7E5193D35DF0609C3FB7D3EB26?sequence=1>, diakses 23 Juni 2018.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukirno Sadono, 2012, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, PT.RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Sumodiningrat,Gunawan.1999.*JPSdanPemberdayaan*.Gramedia.Jakarta
- Wikipedia Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Nelayan> di akses 4 Maret2019.
- Winardi 1991, *Teori Harga dan Perencanaan*, Erlangga, Jakarta.

Halaman ini Sengaja dikosongkan